

## **Strategi Batalyon Zeni Tempur 5/ABW pada Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Dalam Membantu Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Kalimantan Barat**

**Ekashiva Raja Adilah<sup>1</sup> Mhd. Halkis<sup>2</sup> Ari Pitoyo Sumarno<sup>3</sup>**

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [sheiva8891@gmail.com](mailto:sheiva8891@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas strategi Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Penelitian bertujuan menganalisis tugas, hambatan, dan strategi yang diterapkan Yonzipur 5/ABW. Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat dengan metode kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilaksanakan melalui pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial. Kendala meliputi faktor geografis, keterbatasan logistik, dan sumber daya. Strategi berbasis koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya terbukti mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah.

**Kata Kunci:** Strategi Pertahanan, Yonzipur 5/ABW, Perbatasan RI-Malaysia, OMSP, Kesejahteraan Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **INTRODUCTION**

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis dalam konteks kedaulatan negara, stabilitas keamanan, serta pembangunan nasional. Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses pelayanan publik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain. Kondisi geografis yang didominasi hutan, sungai, dan perbukitan turut mempersulit pembangunan dan distribusi logistik. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas wilayah sekaligus membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif pertahanan modern tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan militer, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa OMSP mencakup bantuan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Dalam praktiknya, satuan zeni tempur memiliki kapasitas teknis dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh satuan zeni dalam Satgas Pamtas menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kontribusi TNI terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan wilayah.

Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir telah membahas pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia dari berbagai perspektif. Setiawan (2024) menekankan

pentingnya kerja sama bilateral dalam pengamanan perbatasan melalui patroli terkoordinasi. Syamijaya (2024) membahas optimalisasi dislokasi pasukan dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Sementara itu, Subagyo (2021) menyoroti peran TNI dalam menjaga keamanan perbatasan darat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Dari perspektif sosial, Nur, Moad, dan Novianty (2022) mengkaji penguatan nasionalisme masyarakat perbatasan sebagai bagian dari ketahanan negara. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu perbatasan memiliki dimensi multidisipliner yang mencakup keamanan, diplomasi, tata kelola, serta pembangunan sosial. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek keamanan, kerja sama bilateral, atau penguatan tata kelola perbatasan. Kajian yang secara spesifik menganalisis strategi satuan zeni tempur dalam kerangka OMSP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas. Penelitian yang ada umumnya membahas peran TNI secara umum tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana strategi dirancang, diimplementasikan, dan diintegrasikan antara tujuan (ends), cara (ways), dan sarana (means) dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan. Selain itu, pendekatan yang menghubungkan strategi militer dengan indikator kesejahteraan masyarakat perbatasan secara operasional juga belum banyak dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi, yaitu belum adanya analisis yang secara sistematis mengkaji strategi Batalyon Zeni Tempur dalam Satgas Pamtas sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pendekatan integratif antara aspek pertahanan dan pembangunan. Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya karena memfokuskan pada satuan zeni tempur secara spesifik, menganalisis strategi berdasarkan kerangka teori strategi (ends, ways, means), serta mengkaji kontribusi konkret terhadap kesejahteraan masyarakat dalam konteks OMSP. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa penguatan perspektif bahwa strategi pertahanan di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif dan Pembangunan. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori strategi yang menekankan keseimbangan antara tujuan, cara, dan sarana sebagaimana dikemukakan dalam pemikiran strategi modern. Strategi yang efektif mensyaratkan keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai, metode pelaksanaan, serta sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, konsep kesejahteraan sosial merujuk pada terpenuhinya kebutuhan dasar material dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup secara layak dan produktif. Integrasi antara teori strategi dan konsep kesejahteraan masyarakat menjadi kerangka analisis dalam menilai efektivitas peran satuan zeni tempur dalam OMSP di wilayah perbatasan.

Dari sisi kebijakan publik, pengelolaan perbatasan merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Wilayah perbatasan dipandang sebagai beranda depan negara yang memerlukan pendekatan keamanan sekaligus pembangunan. Dalam implementasinya, TNI melalui Satgas Pamtas memiliki fungsi teritorial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi satuan di lapangan menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut secara empiris. Penelitian ini menjadi relevan karena wilayah perbatasan Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses jalan, minimnya fasilitas umum, serta rendahnya konektivitas antarwilayah. Keterlibatan satuan zeni tempur dalam pembangunan infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, strategi yang tepat tidak hanya berdampak pada keamanan wilayah, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan

uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis strategi yang diterapkan Batalyon Zeni Tempur dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia di Kalimantan Barat; (2) mengidentifikasi kontribusi strategi tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan; dan (3) mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi pertahanan berbasis kesejahteraan serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam optimalisasi peran TNI pada wilayah perbatasan.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam strategi Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Malaysia serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dalam lingkungan nyata dengan batasan ruang dan waktu tertentu.

## RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat pada sektor penugasan Satgas Pamtas Yonzipur 5/ABW. Hasil penelitian disajikan berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### Implementasi Pembangunan Fisik

Data observasi menunjukkan bahwa Satgas Yonzipur 5/ABW melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur berupa jalan penghubung antar dusun, jembatan kayu dan jembatan darurat, serta rehabilitasi fasilitas umum. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap selama masa penugasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

**Tabel 1. Realisasi Pembangunan Infrastruktur oleh Satgas Yonzipur 5/ABW**

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	Pembukaan/Perbaikan Jalan	7 titik	Menghubungkan antar dusun
2	Pembangunan/Rehab Jembatan	4 Unit	Jembatan Kayu dan Darurat
3	Rehabilitasi Fasilitas Umum	5 Unit	Balai Desa dan Fasilitas Sosial

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan pembangunan jalan merupakan kegiatan dengan frekuensi tertinggi. Observasi menunjukkan bahwa akses jalan yang sebelumnya berupa tanah berlumpur telah mengalami pengerasan sehingga kendaraan roda dua dan roda empat dapat melintas. Dokumentasi lapangan memperlihatkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Selain itu, pembangunan jembatan darurat dilakukan pada jalur yang sebelumnya hanya dapat dilalui dengan menyeberang sungai secara langsung. Setelah pembangunan, masyarakat menggunakan jembatan tersebut untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.

### Kegiatan Nonfisik dan Pembinaan Teritorial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain pembangunan fisik, Satgas melaksanakan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, karya bakti bersama masyarakat, dan pendampingan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin di pos-pos perbatasan.

**Tabel 2. Kegiatan Nonfisik Satgas Yonzipur 5/ABW**

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi Pelaksanaan	Partisipasi Masyarakat
1	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	6 kali	±30 orang/kegiatan
2	Karya Bakti	8 kali	±40 orang/kegiatan
3	Pendampingan Sosial	5 kali	±20 orang/kegiatan

Isi tabel menunjukkan bahwa kegiatan karya bakti memiliki tingkat partisipasi tertinggi. Observasi mencatat bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa kegiatan tersebut meningkatkan interaksi antara prajurit dan warga.

### **Hambatan Pelaksanaan Tugas**

Data lapangan menunjukkan adanya hambatan berupa kondisi geografis yang berat, keterbatasan alat berat, dan distribusi logistik yang memerlukan waktu lebih lama. Observasi memperlihatkan bahwa beberapa lokasi pembangunan berada di area perbukitan dan hutan dengan akses terbatas. Wawancara dengan unsur staf logistik menunjukkan bahwa pengiriman material konstruksi dilakukan secara bertahap menggunakan kendaraan taktis dan angkutan lokal. Dokumentasi memperlihatkan penggunaan peralatan konstruksi ringan dalam beberapa kegiatan pembangunan.

### **Dampak Terhadap Aksesibilitas dan Aktifitas Masyarakat**

Hasil observasi menunjukkan peningkatan mobilitas masyarakat setelah pembangunan jalan dan jembatan selesai dilaksanakan. Kendaraan roda dua dan kendaraan pengangkut hasil pertanian terlihat melintasi jalur yang sebelumnya sulit diakses. Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan akses jalan tersebut untuk distribusi hasil pertanian ke pasar kecamatan. Aktivitas transportasi menjadi lebih teratur dibandingkan sebelum perbaikan dilakukan.

### **Discussion**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan Satgas Pamtas dilaksanakan melalui integrasi pembangunan fisik dan kegiatan teritorial. Pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, sedangkan kegiatan nonfisik memperkuat hubungan sosial antara prajurit dan masyarakat. Strategi yang diterapkan memperlihatkan keterpaduan antara tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, cara pelaksanaan melalui pembangunan infrastruktur dan pembinaan sosial, serta sarana berupa personel dan kemampuan teknis zeni tempur. Implementasi kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan lapangan. Hambatan geografis dan keterbatasan logistik memengaruhi durasi pelaksanaan pembangunan, namun kegiatan tetap berlangsung sesuai rencana operasional. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan karya bakti memperlihatkan adanya partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan dan pembinaan yang dilaksanakan selama penugasan berkontribusi terhadap peningkatan akses sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Integrasi antara fungsi pengamanan dan pembangunan berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan Satgas Pamtas di Kalimantan Barat.

### **CONCLUSION**

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia di Kalimantan Barat dilaksanakan melalui integrasi antara fungsi pengamanan dan pembangunan

wilayah. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan rehabilitasi fasilitas umum, serta kegiatan nonfisik berupa pembinaan teritorial dan pelibatan masyarakat. Implementasi strategi memperlihatkan keterpaduan antara tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, cara pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis, serta pemanfaatan kemampuan teknis satuan zeni tempur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sementara kegiatan teritorial memperkuat hubungan sosial antara prajurit dan warga, sehingga mendukung ketahanan wilayah perbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang terfokus pada satu sektor penugasan dan periode waktu tertentu, sehingga belum menggambarkan keseluruhan dinamika Satgas Pamtas di wilayah perbatasan lainnya. Selain itu, pengukuran dampak kesejahteraan masih bersifat kualitatif berdasarkan persepsi dan observasi lapangan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur indikator kesejahteraan secara lebih terukur, memperluas lokasi penelitian pada beberapa satuan zeni tempur, serta melakukan studi komparatif antar wilayah perbatasan guna memperkaya pengembangan konsep strategi pertahanan berbasis kesejahteraan.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Araryaputra, A., Maulidia, H., & Ryanindityo, M. (2024). Strategi penguatan fungsi keimigrasian di perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 6(2). <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>
- Gusfira, N., & Irawan, A. (2023). Penanggulangan kejahatan karantina di perbatasan Kalimantan Utara. *Jurnal Mubeza*, 13(2). <https://doi.org/10.54604/mbz.v13i2.358>
- Jones, L. (2012). ASEAN and border security governance. *International Affairs*, 88(3), 557–575. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01095.x>
- Lavka Vanya, N. (2023). Defense diplomacy in protection of Indonesia–Malaysia border. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2967>
- Nur, S., Moad, & Novianty, F. (2022). Nasionalisme di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31571/pkn.v6i1.3480>
- Pamungkas, C. (2017). Pengelolaan perbatasan dan hubungan antaretnis di Bengkayang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62110>
- Saiman. (2017). Kepentingan pemerintah pusat dalam pembangunan perbatasan Kalimantan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Sospol*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405>
- Setiawan, E. (2024). Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam pengamanan perbatasan melalui patroli terkoordinasi di Kalimantan Barat. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4579>
- Subagyo, A. (2021). Peran TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia. *Insignia Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.2673>
- Syamiajaya, N. A. (2024). Optimalisasi dislokasi pasukan dalam pengamanan perbatasan Kalimantan Barat. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1). <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2066>
- Tan, A. (2016). Maritime and land border security in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 38(1), 85–109. <https://doi.org/10.1355/cs38-1d>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Walker, A. (2011). Borderlands and security in Southeast Asia. *Journal of Borderlands Studies*, 26(3), 279–293. <https://doi.org/10.1080/08865655.2011.641589>

- Wibowo, A. (2018). Border management and national security in Indonesia. *Journal of Defense & Security Analysis*, 34(3), 259–275. <https://doi.org/10.1080/14751798.2018.1478145>
- Wuryandari, G. (2018). Kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.